



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN  
SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar  
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Administrasi

**HERU SETIAWAN  
NPM. 0606017504**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JAKARTA  
JUNI 2009**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Heru Setiawan**

**NPM : 0606017504**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 26 Juni 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Heru Setiawan  
NPM : 0606017504  
Program Studi : Pascasarjana Pengkhususan Administrasi dan  
Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Sistem  
Teknologi Informasi di Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada program studi Administrasi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.**

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. M. Riduansyah, M.Si (.....)

Ketua Sidang : Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein (.....)

Penguji : Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksam, M.Si (.....)

Sekretaris Sidang: Zuliansyah P. Zulkarnain, S.Sos., M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Juni 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains dalam Program Studi Pascasarjana Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Disadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tidak pernah putus memberikan doa restu dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi.
2. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan jajaran pejabat di Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di jenjang Magister ini.
3. Bapak M. Riduansyah, M.Si yang telah dengan tulus membimbing penulis selama masa penulisan tesis ini.
4. Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein beserta staf di Sekretariat Program Studi Ilmu Administrasi yang telah banyak membantu penulis selama masa studi di Magister Ilmu Administrasi.
5. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksun, M.Si yang telah menguji tesis penulis dengan kebesaran hati.
6. Istriku, Khusnul Khotimah, Anakku, Hendi Wijaya dan Belvaretha Latisha, yang senantiasa sabar dalam memberikan kepercayaan dan semangat dalam menyelesaikan tesis.
7. Sahabat dan sejawat di perkuliahan dan di Mahkamah Konstitusi yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Administrasi dan Kebijakan Publik.

Tulisan ini tentunya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karenanya penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran untuk sempurnanya tulisan ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 4 Juli 2009

Penulis

Heru Setiawan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Setiawan  
NPM : 0606017504  
Program Studi : Pascasarjana  
Departemen : Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN SISTEM  
TEKNOLOGI INFORMASI DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK  
INDONESIA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta  
Pada tanggal : 26 Juni 2009  
Yang menyatakan

( Heru Setiawan )

## ABSTRAK

Nama : Heru Setiawan  
Program Studi : Pascasarjana Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik  
Judul : Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Sistem Teknologi Informasi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tesis ini membahas evaluasi terhadap implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK dalam mendukung persidangan MK. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki visi dan misi menjadi peradilan yang modern dan terpercaya, penelitian ini berusaha untuk menilai sejauh mana dukungan kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi (STI) MK telah menjadi solusi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses persidangan MK. Kemudahan akses tersebut antara lain informasi jadwal sidang, risalah persidangan, putusan persidangan, permohonan perkara *online*, dan persidangan jarak jauh dengan teknologi *video conference*.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pengkajian terhadap 6 (enam) indikator penelitian dari William N. Dunn (2003: 429-438) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Narasumber yang berhasil diwawancara adalah pejabat dan staf MK yaitu Sekretaris Jenderal MK, Kepala Biro Humas dan Protokol, Ketua Unit Layanan Pengadaan MK, dan staf IT MK.

Dengan menggali kebenaran informasi baik melalui wawancara maupun data sekunder serta dokumentasi media cetak, dan media *online*, maka diperoleh simpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penyediaan STI MK sudah dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat waktu. Wujud kebijakan penyediaan STI MK telah memenuhi aspek kecukupan dari kebutuhan persidangan MK. Kebijakan penyediaan STI MK telah meningkatkan pelayanan publik dalam hal kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK, dan kebijakan penyediaan STI MK telah direspon oleh masyarakat melalui 22 (dua puluh dua) pendaftaran perkara online dan 17 (tujuh belas) persidangan jarak jauh dalam persidangan sengketa pemilu 2009 di MK.

Saran yang dapat diberikan dalam evaluasi implementasi kebijakan penyediaan STI MK adalah bahwa implementasi kebijakan tersebut saat ini telah menjadi solusi terutama dalam kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK. Dukungan STI MK tersebut secara konsisten dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, *website* MK, MK Program Televisi, MK Program Radio. Saran lebih lanjut, agar selalu ditingkatkan kompetensi pegawai yang membidangi STI MK, pemeliharaan perangkat STI yang

## **ABSTRACTION**

Name : Heru Setiawan

Study Program: Postgraduate program in Administration and Public Policy

Title : An Evaluation on The Implementation of Information Technology  
System Procurement Policy in The Constitutional Court of The  
Republic of Indonesia

This thesis elaborates an evaluation towards the policy for information technology system procurement in The Constitutional Court. The research is aimed at knowing the level of success in the implementation of information technology system procurement policy in The Constitutional Court in providing support to Court's activities. As a judicial institution with its vision and mission to be a modern and legitimate court, the research tries to discover how far the policy support in information technology system procurement within The Constitutional Court becomes the solution in providing Indonesian people with access to the court. The access are implemented through information on court schedule, court's transcription, court's ruling, online case registration, and long-distant trial system through video conference.

The research is carried out by using descriptive research method with qualitative approach focusing on the study of six research indicators as mentioned by William N. Dunn (2003: 429-438), namely, effectiveness, efficiency, sufficiency, equality, responsivity, and accuracy. The sources for interviews are from the officials and the staffs of the Constitutional Court, namely, The Secretary General, Chief of Protocol and Public Relation Bureau, Head of Procurement Service Unit and a staff of IT division.

From the process of information discovery through interviews and secondary source data also documentation archive from printed and online media, it can be concluded that the Procurement for IT System in The Constitutional Court has been implemented effectively, efficiently and punctually. The policy for the procurement of IT System within the Constitutional Court has met the sufficiency aspect of the demand in the Constitutional Court's activities. The policy for procuring IT system in The Constitutional Court has improved the service to public in providing easy access for people to the judicial activities in the court, and such policy has been responded by the people in form of 22 (twenty-two) cases registered online and 17 (seventeen) long-distant trials has been carried out in the dispute over 2009 election result cases in the Constitutional Court.

Of the advice to be given as an evaluation to the implementation of IT System Procurement Policy in The Constitutional Court is that the policy has been a solution especially in providing easy access to the people to the Court's trials. The support to IT System ought to be consistently carried out and socialized to the the people through available channels, printed media, electronic media, The Court's official website, Court's television and radio programs. As further advice, the



mendukung persidangan MK serta selalu melakukan penyesuaian terhadap perubahan STI dunia, sehingga dukungan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK senantiasa dapat mendukung kemudahan akses masyarakat dalam menjangkau peradilan Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya.

Kata kunci:

evaluasi, implementasi, teknologi informasi

officers' competence within the IT system area have to be improved, and there ought to be continual maintenance of the equipment and there ought to be adjustment to the global development of IT system. Hence, the support in the implementation of the policy can always provide easy access for the people to the trials in the modern and legitimate Constitutional Court.

Keywords:

evaluation, implementation, information, technology

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACTION .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Signifikansi Penelitian .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>2. TINJAUAN LITERATUR .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Literatur .....	9
2.1.1 Output Penelitian Sebelumnya .....	9
2.1.2 Kebijakan Publik .....	11
2.1.3 Perumusan Kebijakan .....	13
2.1.4 Implementasi Kebijakan .....	15
2.1.5 Evaluasi Kebijakan .....	17
2.2 Sistem Teknologi Informasi .....	23
2.2.1 Konsep Dasar .....	23
2.2.2 Komponen Sistem dan Teknologi Informasi .....	24
2.2.3 <i>Electronic Government</i> .....	25
2.3 Operasionalisasi Konsep .....	30
<b>3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Metode Penelitian .....	31
3.1.1 Pendekatan Penelitian .....	31
3.1.2 Teknik Pengumpulan data dan Informan .....	32
3.1.3 Teknik Analisis Data .....	36
3.1.4 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
3.1.5 Keterbatasan Penelitian .....	38
<b>4. GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>

4.1 Sejarah Mahkamah Konstitusi (Disarikan dari Lima Tahun Menegakkan Konstitusi Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008) .....	39
4.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	42
4.3 Gambaran Umum Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK .....	46
4.4 Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi .....	53
4.4.1 Penanganan Perkara 2008 .....	53
4.4.2 Pemeriksaan Perkara .....	57
4.5 Gambaran Umum Sistem Teknologi Informasi Mahkamah Konstitusi .....	66
4.5.1 Website Mahkamah Konstitusi .....	66
4.5.2 Video Conference .....	66
4.5.3 MK Program Televisi dan Radio .....	67
4.5.4 Sistem Informasi Manajemen Perkara Online .....	67
4.6 Pembahasan .....	85
4.6.1 Efektifitas .....	86
4.6.2 Efisiensi .....	94
4.6.3 Kecukupan .....	106
4.6.4 Perataan .....	117
4.6.5 Responsivitas .....	120
4.6.6 Ketepatan .....	123
<b>5. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>130</b>
5.1 Simpulan .....	130
5.2 Saran .....	130

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Model Rasional Sederhana .....	14
Gambar 2.	Implementasi Kebijakan .....	16
Gambar 3.	Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi .....	50
Gambar 4.	Perkara yang diregistrasi tahun 2008 .....	53
Gambar 5.	Jumlah Perkara 2008 .....	54
Gambar 6.	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara 2008 .....	56
Gambar 7.	Amar Putusan Perkara 2008 .....	57
Gambar 8.	Putusan berdasarkan Norma (Ketentuan) 2008 .....	57
Gambar 9.	Kegiatan Persidangan MK 2008 .....	59
Gambar 10.	Perkara Tahun 2003 s.d. 2008 .....	63
Gambar 11.	Dampak Putusan MK terhadap Undang-Undang Tahun 2003 s.d. 2008 .....	65
Gambar 12.	<i>Form</i> Pendaftaran .....	69
Gambar 13.	Prasyarat mengajukan perkara baru .....	69
Gambar 14.	<i>Form</i> Permohonan Perkara .....	70
Gambar 15.	Tanda Terima Permohonan Perkara .....	70
Gambar 16.	Daftar Perbaikan Perkara .....	71
Gambar 17.	Detail Perbaikan Perkara .....	71
Gambar 18.	Tanda Terima Permohonan Perbaikan Perkara .....	72
Gambar 19.	Prasyarat permohonan pihak terkait .....	72
Gambar 20.	Daftar Perkara yang Masih Berjalan .....	73
Gambar 21.	Detail Perkara .....	73
Gambar 22.	Fungsi Menyertakan Berkas dalam Permohonan Pihak Terkait ...	74
Gambar 23.	Tampilan Cetakan Bukti dalam Permohonan Pihak Terkait .....	74
Gambar 24.	Tampilan Utama Saksi/Ahli .....	75
Gambar 25.	Tampilan <i>List</i> Perkara sedang dalam Proses .....	75
Gambar 26.	Tampilan Fungsi Permohonan Saksi/Ahli .....	76
Gambar 27.	Tampilan <i>Form</i> Permohonan Saksi/Ahli .....	76
Gambar 28.	Tampilan Utama Pada Fitur Penarikan Perkara .....	77
Gambar 29.	Tampilan daftar Perkara dalam Fungsi Penarikan Perkara .....	77
Gambar 30.	Tampilan <i>Form</i> Penarikan Perkara .....	78
Gambar 31.	Tampilan Cetakan Bukti dalam Penarikan Perkara .....	78
Gambar 32.	Tampilan Utama Fungsi Penambahan Dokumen .....	79
Gambar 33.	Tampilan daftar Perkara Sedang Berjalan .....	79
Gambar 34.	Tampilan rincian Perkara dan daftar Perkara yang Sedang Berjalan .....	80
Gambar 35.	Tampilan <i>Input</i> Dokumen .....	80
Gambar 36.	Tampilan Tanda Terima Dokumen .....	81
Gambar 37.	Tampilan Menu Jadwal Sidang .....	81
Gambar 38.	<i>List</i> daftar sidang perkara .....	82
Gambar 39.	Risalah Sidang .....	82
Gambar 40.	Tampilan Riwayat Perkembangan Perkara .....	83
Gambar 41.	Putusan Sidang .....	84

Gambar 42.	<i>Application Map</i> .....	92
Gambar 43.	Kebijakan dan Implementasi STI MK .....	94
Gambar 44.	Penggunaan <i>Video Conference</i> dalam Persidangan Jarak Jauh (Media Indonesia, 27 Mei 2009, Halaman 2) .....	101
Gambar 45.	Sistem Teknologi Informasi <i>E-mail</i> MK .....	108
Gambar 46.	Perpustakaan <i>Online</i> .....	109
Gambar 47.	Pusat Informasi Hukum .....	110
Gambar 48.	Putusan Perkara Terkini .....	111
Gambar 49.	Rancang Bangun Sistem Teknologi Informasi <i>Vicon</i> MK .....	113

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penjabaran Kriteria Evaluasi .....	30
Tabel 2.	Variabel Penilaian .....	34
Tabel 3.	Penjabaran Kriteria Evaluasi .....	36
Table 4.	Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2008 .....	51
Tabel 5.	Program Rintisan Gelar Peningkatan SDM Pegawai .....	52
Tabel 6.	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara 2007 .....	55
Tabel 7.	Kegiatan Persidangan MK 2008 .....	58
Tabel 8.	Kehadiran Para Pihak dalam Persidangan MK 2008 .....	59
Tabel 9.	Berkas Perkara yang telah diminutasi 2008 .....	60
Tabel 10.	Jumlah Perkara yang diregistrasi 2003-2008 .....	61
Tabel 11.	Perbandingan Persentase Putusan MK 2003-2008 .....	65
Tabel 12.	Pagu Penetapan HPS .....	96
Tabel 13.	Penetapan Harga .....	97
Tabel 14.	Pagu Anggaran Pengadaan Perangkat STI MK .....	98
Tabel 15.	Hasil Evaluasi Teknis dan Harga Ditetapkan .....	99
Tabel 16.	Jadwal Kesesuaian Implementasi STI MK .....	106
Tabel 17.	Solusi Sistem Teknologi Informasi Bagi Persidangan MK .....	116
Tabel 18.	Daftar Pemohon yang Melakukan Permohonan <i>Online</i> Persidangan MK .....	121
Tabel 19.	Persidangan Jarak Jauh MK dalam Sengketa Pemilu 2009.....	122